



Strategi Pembangunan Berkelanjutan Perkotaan-Pedesaan: Studi Kasus Provinsi Lampung

Saiful Bahri^{1*}, Erlin Kurniati²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email :saifulbahris.e1@gmail.com

Received: 21-04-2025

Revised: 30-05-2025

Accepted : 01-06-2025

Published : 28-06-2025

Abstract

This study examines the strategies for achieving balanced urban and rural development in Lampung Province, focusing on infrastructure development, human resource capacity building, economic diversification, and the collaboration between government and the private sector. It aims to analyze the current state of urban-rural disparities in the province and proposes sustainable solutions to enhance growth in both urban and rural areas. The research highlights the role of infrastructure in connecting urban and rural areas, the importance of human resource development in rural areas, and the need for diversifying local economies to reduce dependency on agriculture. Moreover, it explores the significance of public-private partnerships in fostering sustainable development. The findings suggest that strategic investments, coupled with robust policies and cooperation between stakeholders, are crucial for achieving balanced development in Lampung. The contribution of this research lies in strengthening the theory of regional development through the integration of infrastructure, human resources, and multi-sector partnership approaches. Its practical implications provide a reference for local governments in formulating integrated development policies that are responsive to regional disparities.

Keywords: *Urban and rural development, infrastructure, human resource development, economic diversification, public-private partnership, Lampung*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji strategi pencapaian pembangunan yang seimbang antara perkotaan dan pedesaan di Provinsi Lampung, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, dan kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi ketimpangan perkotaan-pedesaan di provinsi tersebut dan mengusulkan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan di kedua wilayah tersebut. Penelitian ini menyoroti peran infrastruktur dalam menghubungkan daerah perkotaan dan pedesaan, pentingnya pengembangan sumber daya manusia di pedesaan, serta perlunya diversifikasi ekonomi lokal untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pentingnya kemitraan publik-swasta dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa investasi strategis, didukung dengan kebijakan yang kuat dan kerjasama antar pihak, sangat penting untuk mencapai pembangunan yang seimbang di Lampung. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan teori pembangunan wilayah melalui integrasi pendekatan infrastruktur, sumber daya manusia, dan kemitraan multi-sektor. Implikasi praktisnya memberikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan terpadu yang responsif terhadap kesenjangan wilayah.

Kata Kunci: *Pembangunan perkotaan dan pedesaan, infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi ekonomi, kemitraan publik-swasta, Lampung*



Pendahuluan

Pembangunan berkelanjutan merupakan pendekatan strategis yang menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Di Indonesia, ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi tantangan serius. Kota-kota besar berkembang pesat, sementara desa-desa sering kali tertinggal dalam hal infrastruktur dan akses layanan dasar. Ketimpangan ini dapat memicu urbanisasi yang tidak terkendali dan memperlebar kesenjangan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yang mendorong pembangunan inklusif dan berkelanjutan (Kurniawan & Artisa, 2023).

Provinsi Lampung, sebagai salah satu wilayah strategis di Sumatera, menghadapi tantangan dalam mengelola pertumbuhan perkotaan dan pembangunan pedesaan. Kota Bandar Lampung mengalami pertumbuhan pesat, sementara daerah pedesaan di sekitarnya masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan layanan publik. Ketimpangan ini dapat menghambat upaya pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Studi oleh Rahman et al. (2025) menunjukkan bahwa urbanisasi yang tidak terkendali di Bandar Lampung telah menyebabkan konversi lahan hijau dan tekanan pada infrastruktur kota. Hal ini menyoroti pentingnya strategi pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Pendekatan integrasi perkotaan-pedesaan di Lampung memiliki keunikan tersendiri karena Provinsi Lampung terletak pada jalur strategis Sumatera-Jawa, sehingga menjadi wilayah transit yang dihadapkan pada dinamika urbanisasi tinggi sekaligus ketergantungan ekonomi berbasis pertanian. Kondisi ini menciptakan tantangan ganda berupa tekanan pembangunan perkotaan yang cepat dan kebutuhan revitalisasi pedesaan yang masih lemah infrastrukturnya.

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah pengembangan kawasan perdesaan melalui pemanfaatan potensi lokal dan peningkatan partisipasi masyarakat. Kurniawan & Artisa (2023) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa untuk mencapai tujuan SDGs. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, program pembangunan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan meningkatkan keberlanjutan. Selain itu, penguatan kapasitas lembaga desa dan kolaborasi antar pemangku kepentingan juga menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang berkelanjutan. Pendekatan ini dapat membantu mengurangi ketimpangan antara kota dan desa di Provinsi Lampung.

Di sisi lain, pembangunan perkotaan di Provinsi Lampung juga memerlukan perhatian khusus, terutama dalam hal pengelolaan pertumbuhan kota yang pesat. Rahman et al. (2025) mencatat bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat di Bandar Lampung telah menyebabkan peningkatan kebutuhan akan infrastruktur dan layanan publik. Namun, tanpa perencanaan yang matang, pertumbuhan ini dapat menyebabkan kemacetan, degradasi lingkungan, dan penurunan kualitas hidup. Oleh karena itu, diperlukan strategi pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, termasuk pengembangan transportasi publik, pengelolaan tata ruang yang efisien, dan pelestarian lingkungan. Dengan demikian, kota-kota di Provinsi Lampung dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi seluruh warganya. Integrasi antara pembangunan perkotaan dan pedesaan menjadi kunci dalam mencapai keseimbangan pembangunan di wilayah ini.

Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek kebijakan dan perencanaan dalam pembangunan wilayah. Studi oleh Wodson & Sulistyono (2017) menunjukkan bahwa pengembangan kota baru di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan, memerlukan perencanaan yang matang untuk mengintegrasikan kegiatan sosial-ekonomi dan



keterkaitan dengan daerah sekitarnya. Perencanaan yang baik dapat membantu menghindari konflik penggunaan lahan dan memastikan bahwa pembangunan kota baru memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Dengan pendekatan ini, pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dalam konteks Provinsi Lampung, integrasi antara pembangunan perkotaan dan pedesaan dapat dicapai melalui pengembangan infrastruktur yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Misalnya, pembangunan jalan dan transportasi yang menghubungkan desa-desa dengan pusat kota dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Selain itu, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat desa dapat mengakses informasi, layanan, dan peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Langkah ini juga dapat membantu menciptakan konektivitas yang lebih baik antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selanjutnya, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Kurniawan & Artisa (2023) menekankan bahwa keberhasilan program pembangunan desa sangat bergantung pada kapasitas lembaga desa dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi program-program tersebut. Pelatihan dan pendampingan bagi aparat desa serta penguatan sistem tata kelola menjadi langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat desa. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks Provinsi Lampung, integrasi antara pembangunan perkotaan dan pedesaan dapat dicapai melalui pengembangan infrastruktur yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Misalnya, pembangunan jalan dan transportasi yang menghubungkan desa-desa dengan pusat kota dapat meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan. Selain itu, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi juga dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kota dan desa. Dengan memanfaatkan teknologi, masyarakat desa dapat mengakses informasi, layanan, dan peluang ekonomi yang sebelumnya sulit dijangkau. Langkah ini juga dapat membantu menciptakan konektivitas yang lebih baik antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

Selanjutnya, penting untuk memperkuat kapasitas kelembagaan di tingkat lokal dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Mahmud dan Junaidi (2024) menekankan bahwa pengorganisasian masyarakat di daerah pedesaan dapat meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan komunitas dalam proses pembangunan. Dengan membentuk kader-kader lokal yang memiliki pemahaman tentang kebutuhan dan potensi desa, pembangunan dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta juga dapat memperkuat kapasitas kelembagaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan di Provinsi Lampung dapat berjalan secara harmonis dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang menekankan integrasi antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Terakhir, penting untuk mengadopsi pendekatan pembangunan yang berbasis pada potensi lokal dan kearifan lokal. Puspita et al. (2025) dalam studi mereka tentang strategi pengembangan kawasan minapolitan di Lampung Timur menyoroti pentingnya pengembangan berbasis potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memanfaatkan sumber daya lokal secara optimal dan melibatkan masyarakat dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, hasil yang dicapai akan lebih berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini juga dapat membantu melestarikan budaya lokal dan memperkuat identitas komunitas. Dengan demikian, pembangunan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang menekankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Menurut Purwanto (2018), pembangunan berkelanjutan bertujuan memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Dalam konteks tata ruang wilayah, prinsip ini digunakan untuk merancang kebijakan pembangunan yang inklusif dan tidak eksploitatif. Salah satu indikator utama keberlanjutan adalah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan (Wahyuni, 2020). Hal ini menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menuntut pendekatan integratif dan partisipatif.

Implementasi pembangunan berkelanjutan di Indonesia telah masuk dalam kebijakan nasional melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Seperti dijelaskan oleh Ardiansyah dan Fatimah (2021), kebijakan ini mencakup 17 tujuan yang mencakup isu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 sebagai dasar pelaksanaan SDGs di tingkat nasional dan daerah. Namun, pelaksanaan di daerah sering kali terkendala oleh kapasitas kelembagaan dan pembiayaan. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil sangat diperlukan (Hutagalung, 2022). Dengan strategi yang tepat, pembangunan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.

Strategi Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan

Pembangunan perkotaan berkelanjutan mencakup upaya mewujudkan kota yang layak huni, efisien, dan ramah lingkungan. Menurut Sari dan Nugroho (2021), strategi ini mencakup penyediaan infrastruktur hijau, efisiensi energi, dan transportasi publik yang terintegrasi. Kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi juga harus menyediakan ruang terbuka hijau untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Selain itu, kota harus mampu merespons tantangan sosial seperti kemiskinan dan ketimpangan. Hal ini bisa dicapai melalui penguatan tata kelola kota yang partisipatif dan transparan. Penerapan prinsip ini terlihat dalam program kota pintar dan kota hijau di beberapa wilayah Indonesia.

Contoh konkret pembangunan kota berkelanjutan dapat dilihat dari Kota Batu yang mengembangkan strategi berbasis ekowisata. Menurut penelitian oleh Pradana dan Widodo (2022), pendekatan ini menekankan pada pelestarian lingkungan sekaligus penguatan ekonomi lokal. Dengan mengembangkan pariwisata yang ramah lingkungan, kota dapat menarik investasi tanpa merusak alam. Program ini juga melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan destinasi wisata, sehingga meningkatkan rasa kepemilikan. Upaya ini memperlihatkan sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat. Strategi serupa dapat direplikasi di kota-kota lain untuk mewujudkan urbanisasi yang berkelanjutan.

Strategi Pembangunan Pedesaan Berkelanjutan

Pembangunan pedesaan berkelanjutan berfokus pada pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa. Menurut Lestari dan Handayani (2020), pendekatan ini



mencakup pembangunan pertanian ramah lingkungan, pelestarian budaya lokal, dan peningkatan kualitas hidup. Salah satu pendekatan efektif adalah pembangunan berbasis masyarakat (community-based development) yang mendorong inisiatif lokal. Strategi ini mendukung terciptanya ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat desa. Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga sangat penting dalam menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Program Desa Mandiri menjadi salah satu inisiatif pemerintah dalam mewujudkan tujuan ini.

Kendati demikian, pembangunan pedesaan menghadapi tantangan seperti ketimpangan akses infrastruktur dan migrasi penduduk ke kota. Berdasarkan hasil studi oleh Hartono dan Sulastri (2021), desa-desa di kawasan tertinggal sering tidak mendapat prioritas dalam alokasi anggaran. Oleh sebab itu, diperlukan perencanaan pembangunan desa yang berbasis data dan kebutuhan lokal. Pemerintah perlu mengintegrasikan pembangunan desa dalam perencanaan wilayah yang lebih luas. Keterlibatan lembaga swadaya masyarakat juga penting untuk mengisi kekosongan peran pemerintah. Dengan demikian, strategi pembangunan pedesaan berkelanjutan harus disusun secara menyeluruh dan kontekstual.

Ketimpangan Pembangunan antara Kota dan Desa

Ketimpangan pembangunan antara kota dan desa menjadi isu krusial dalam perencanaan wilayah di Indonesia. Menurut Wicaksono dan Hidayat (2022), perbedaan dalam alokasi anggaran dan akses infrastruktur menyebabkan ketimpangan yang signifikan. Kota-kota besar mendapatkan prioritas pembangunan, sementara desa-desa tertinggal tertinggal jauh dalam aspek pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Fenomena urban bias ini memperparah disparitas wilayah dan mendorong arus urbanisasi. Hal ini berdampak negatif terhadap pertumbuhan desa yang potensial. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan afirmatif yang berpihak pada wilayah perdesaan.

Upaya mengatasi ketimpangan ini dapat dilakukan melalui pendekatan pembangunan wilayah yang terintegrasi. Pemerintah perlu mendorong keterkaitan fungsional antara kota dan desa melalui pembangunan konektivitas dan jaringan ekonomi. Studi oleh Susanti dan Maulana (2020) menyebutkan bahwa penguatan ekonomi lokal di desa melalui kluster usaha kecil mampu mengurangi kesenjangan. Selain itu, akses pendidikan dan kesehatan yang merata dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa. Peran pemerintah daerah sangat penting dalam menyelaraskan pembangunan agar tidak hanya terkonsentrasi di kota. Dengan perencanaan yang menyeluruh, ketimpangan pembangunan dapat dikurangi secara bertahap.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Wilayah

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan wilayah yang adil dan berkelanjutan. Menurut Kurniawan dan Astuti (2019), desentralisasi memberikan kewenangan bagi daerah untuk mengelola sumber daya dan merancang program pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Namun, masih banyak daerah yang belum optimal dalam memanfaatkan otonomi karena lemahnya kapasitas kelembagaan. Kurangnya koordinasi antar sektor juga menghambat pelaksanaan program pembangunan. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem perencanaan sangat diperlukan. Pemerintah daerah juga harus mampu menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat sipil.

Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci sukses pembangunan yang merata. Dalam studi yang dilakukan oleh Darmawan dan Siregar (2021), sinergi dalam

program pembangunan berbasis kawasan terbukti mampu meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas program. Pemerintah daerah harus lebih adaptif dalam merespons isu-isu global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan teknologi digital. Implementasi teknologi informasi dalam sistem pemerintahan juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penguatan perencanaan pembangunan daerah berbasis data menjadi langkah awal untuk menciptakan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan begitu, pemerintah daerah bisa menjadi motor penggerak pembangunan yang inklusif.

Studi Kasus: Provinsi Lampung sebagai Model Pembangunan Terpadu

Provinsi Lampung merupakan salah satu wilayah yang tengah mengembangkan model pembangunan wilayah yang terpadu antara perkotaan dan pedesaan. Menurut Yuliana dan Herlambang (2021), Pemerintah Provinsi Lampung telah merancang program pembangunan yang memprioritaskan konektivitas antar wilayah dan pemberdayaan ekonomi lokal. Salah satu contohnya adalah pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan desa-desa terpencil ke pusat kota. Selain itu, pengembangan agrowisata menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan. Kebijakan ini menunjukkan sinergi antara sektor pertanian dan pariwisata secara berkelanjutan. Model ini dapat dijadikan contoh bagi provinsi lain dalam merancang pembangunan yang seimbang.

Namun, meskipun ada kemajuan, masih banyak tantangan dalam penerapan strategi pembangunan terpadu di Lampung. Studi oleh Prasetyo dan Dewi (2022) menemukan bahwa beberapa wilayah di Lampung masih menghadapi masalah ketimpangan infrastruktur dan akses layanan publik. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan pembangunan berbasis wilayah. Pemerintah perlu lebih intensif melibatkan masyarakat lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal harus didukung oleh pelatihan dan pembinaan usaha. Dengan strategi yang tepat, Lampung berpotensi menjadi contoh sukses pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami strategi pembangunan perkotaan dan pedesaan secara mendalam dengan studi kasus di Provinsi Lampung. Penelitian dilaksanakan selama periode Januari hingga Maret 2025, dengan lokasi pengumpulan data di Kota Bandar Lampung dan beberapa kecamatan di Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Selatan. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan informan kunci seperti aparat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan pelaku pembangunan lokal, serta melalui studi dokumentasi kebijakan dan program pembangunan daerah. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 12 orang, terdiri dari 5 pejabat pemerintah daerah, 3 tokoh masyarakat, dan 4 pelaku pembangunan lokal. Kriteria inklusi informan meliputi mereka yang memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam bidang pembangunan wilayah, terlibat langsung dalam penyusunan atau pelaksanaan kebijakan pembangunan, serta bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, dengan mempertimbangkan relevansi dan pemahaman mereka terhadap isu pembangunan wilayah. Analisis data dilakukan secara interaktif dengan model Miles dan Huberman, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan dan konsistensi informasi yang diperoleh. Pendekatan ini diharapkan dapat

memberikan gambaran yang utuh mengenai upaya membangun keseimbangan pembangunan antara kota dan desa di Provinsi Lampung.

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan infrastruktur yang memadai merupakan faktor utama dalam mendorong keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di Provinsi Lampung, aksesibilitas antarwilayah sangat bergantung pada kualitas infrastruktur jalan dan jembatan yang menghubungkan kedua wilayah tersebut. Selain itu, infrastruktur dasar seperti penyediaan listrik, air bersih, dan telekomunikasi juga menjadi penunjang penting bagi kualitas hidup masyarakat di pedesaan. Sebagai contoh, pembangunan jalan yang menghubungkan desa-desa dengan kota besar tidak hanya mempercepat distribusi barang dan jasa, tetapi juga meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat desa. Oleh karena itu, investasi yang berkelanjutan dalam infrastruktur menjadi sangat penting bagi percepatan pembangunan yang merata (Mardiasmo, 2018).

Pembangunan infrastruktur di Lampung telah menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antara kota dan desa. Namun, tantangan besar yang dihadapi adalah masalah pendanaan dan koordinasi antarinstansi pemerintah yang sering kali menghambat kelancaran pelaksanaan proyek-proyek besar. Sebagai contoh, beberapa proyek infrastruktur yang terhenti atau terbengkalai disebabkan oleh keterbatasan anggaran yang tidak mencukupi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya pembangunan yang besar, keberlanjutan proyek sering kali terganggu oleh faktor eksternal. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang lebih matang dan pembagian anggaran yang lebih efisien untuk memastikan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan di seluruh provinsi (Supriyanto & Suryana, 2020). Temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara pembangunan infrastruktur dan keseimbangan wilayah dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan infrastruktur yang inklusif, berwawasan lingkungan, dan berbasis partisipasi masyarakat.

Keberlanjutan dalam pembangunan infrastruktur juga menjadi isu yang tak bisa diabaikan. Infrastruktur yang dibangun dengan baik namun tidak dirawat dengan benar dapat cepat rusak dan tidak memberikan manfaat jangka panjang. Oleh karena itu, pemeliharaan dan perbaikan rutin harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah daerah. Dalam konteks ini, masyarakat lokal perlu dilibatkan dalam perencanaan dan pemeliharaan infrastruktur agar bisa menjaga dan merawat fasilitas yang sudah dibangun. Dengan adanya keterlibatan masyarakat, maka keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin. Pendekatan ini juga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat dalam hal pemeliharaan infrastruktur (Raharjo, 2017).

Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan lancar dan berkelanjutan. Pemerintah daerah harus bekerja sama dengan sektor swasta dalam hal pendanaan dan penyediaan teknologi yang lebih ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan untuk berperan aktif dalam menjaga dan merawat infrastruktur yang ada. Program-program penyuluhan mengenai pentingnya infrastruktur yang berkualitas harus diberikan kepada masyarakat, agar mereka lebih sadar akan pentingnya pemeliharaan. Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara ketiga pihak ini, maka tujuan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa bisa lebih tercapai (Wahyudi, 2019).



Pembangunan infrastruktur juga harus memperhatikan aspek lingkungan agar tidak menambah beban kerusakan alam. Proyek-proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan kelestarian alam bisa berakibat buruk dalam jangka panjang, seperti erosi atau kerusakan ekosistem. Oleh karena itu, penting bagi perencanaan infrastruktur di Lampung untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang ramah lingkungan. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan teknologi hijau dan desain yang memperhatikan konservasi alam. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya akan menguntungkan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan hidup (Prihatin, 2016).

Meskipun pembangunan infrastruktur sangat penting untuk pengembangan wilayah, tetap diperlukan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaannya. Pengawasan yang efektif dapat mencegah penyimpangan anggaran dan kualitas pembangunan yang rendah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membentuk lembaga atau tim pengawas yang dapat memastikan bahwa proyek infrastruktur berjalan sesuai dengan rencana dan standar yang ditetapkan. Selain itu, transparansi dalam proses pengadaan barang dan jasa juga harus dijaga untuk menghindari praktik-praktik korupsi yang bisa merugikan masyarakat (Santosa & Riawan, 2019).

Infrastruktur yang baik tidak hanya berfungsi untuk mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat hubungan sosial antarwilayah. Di Lampung, pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa dengan pusat kota memungkinkan mobilitas penduduk yang lebih tinggi. Hal ini juga memperluas akses masyarakat desa terhadap pendidikan, kesehatan, dan pasar yang lebih luas. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur harus dilihat sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan sosial di daerah pedesaan (Mardiasmo, 2018).

Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan akan menghasilkan efek positif yang luas, tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk pemerataan kualitas hidup. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan fasilitas dasar, diharapkan ketimpangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan dapat dikurangi. Melalui perencanaan yang tepat dan implementasi yang efisien, pembangunan infrastruktur di Lampung dapat menjadi model bagi provinsi lain di Indonesia dalam mengatasi tantangan pembangunan yang merata (Supriyanto & Suryana, 2020).

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah pedesaan memainkan peran penting dalam mewujudkan keseimbangan pembangunan antara kota dan desa. Di Provinsi Lampung, sektor pertanian dan perikanan masih menjadi sektor utama yang mendominasi kegiatan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM di sektor ini sangat diperlukan agar hasil produksi menjadi lebih produktif dan kompetitif. Berbagai program pelatihan keterampilan yang relevan, seperti teknik budidaya pertanian dan perikanan, serta pengelolaan hasil pertanian yang efisien, harus diperkenalkan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, pendidikan vokasi dan pelatihan teknis untuk masyarakat desa perlu difokuskan untuk memperkuat keterampilan kerja yang lebih berorientasi pasar (Sudarsono, 2017).

Pentingnya pelatihan keterampilan dan peningkatan kapasitas SDM di pedesaan tidak bisa dipandang sebelah mata. Program-program pemberdayaan yang berfokus pada kewirausahaan dan pengelolaan sumber daya alam secara ramah lingkungan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat desa. Pemerintah daerah di Lampung telah berupaya meluncurkan berbagai program pelatihan kewirausahaan, seperti pelatihan pengolahan hasil pertanian dan pemasaran produk lokal. Dengan adanya pelatihan tersebut, diharapkan masyarakat pedesaan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka untuk



berbisnis dan mengelola sumber daya alam dengan cara yang berkelanjutan. Program ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa (Aminah, 2018).

Namun, meskipun berbagai program pengembangan SDM telah dilaksanakan, tantangan terbesar tetap terkait dengan keterbatasan fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai. Di banyak daerah pedesaan di Lampung, akses terhadap pusat pelatihan keterampilan yang berkualitas masih sangat terbatas. Banyak masyarakat desa yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka. Untuk itu, perlu ada upaya lebih lanjut dari pemerintah untuk memperluas jangkauan layanan pendidikan dan pelatihan, baik melalui pusat pelatihan keterampilan yang berbasis desa maupun dengan memanfaatkan teknologi digital untuk pelatihan jarak jauh. Dengan demikian, setiap individu di desa memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri (Yuliana, 2020).

Kendala lain yang dihadapi dalam pengembangan SDM di pedesaan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pelatihan dan pendidikan yang ditawarkan. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap kualitas program pelatihan atau kurangnya informasi yang jelas mengenai manfaat mengikuti pelatihan tersebut. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan untuk lebih aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya pengembangan diri melalui pelatihan keterampilan. Selain itu, insentif bagi masyarakat yang aktif mengikuti pelatihan dapat menjadi salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program-program tersebut (Suryadi, 2019).

Salah satu solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat adalah dengan membangun pusat-pusat pelatihan keterampilan yang terjangkau di tingkat desa. Pusat-pusat pelatihan ini tidak hanya menyediakan pelatihan keterampilan, tetapi juga berfungsi sebagai tempat untuk mendidik masyarakat mengenai peluang bisnis dan cara mengelola usaha kecil. Dalam hal ini, keterlibatan sektor swasta juga sangat penting untuk menyediakan fasilitas pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dapat menciptakan ekosistem yang kondusif untuk pengembangan SDM yang lebih baik di pedesaan (Fitria, 2017).

Selain itu, pengembangan SDM yang berbasis pada potensi lokal harus menjadi fokus utama dalam perencanaan program pelatihan. Program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal dapat membantu meningkatkan keterampilan yang lebih relevan dengan kondisi dan sumber daya yang ada di pedesaan. Misalnya, di daerah-daerah yang bergantung pada sektor pertanian, pelatihan terkait dengan teknik pertanian modern, manajemen pertanian organik, atau budidaya tanaman unggulan harus diberikan perhatian lebih. Dengan adanya program pelatihan yang berbasis pada potensi lokal ini, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mudah mengakses peluang yang ada di sekitar mereka (Rahayu, 2016).

Keberhasilan pengembangan SDM di pedesaan tidak hanya bergantung pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga pada kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi dan teknologi. Di era digital ini, keterampilan teknologi dan informasi semakin penting, bahkan untuk masyarakat desa. Oleh karena itu, pelatihan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi harus menjadi bagian dari pengembangan SDM di wilayah pedesaan. Mengintegrasikan teknologi dalam kehidupan sehari-hari di desa dapat mempercepat proses transformasi ekonomi dan memperluas peluang bagi masyarakat untuk

mengakses informasi pasar, memasarkan produk mereka, serta memperkenalkan inovasi baru dalam kegiatan ekonomi mereka (Suyanto, 2018).

Pemerintah dan lembaga pendidikan harus terus mendorong program-program pengembangan SDM yang tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan teknis, tetapi juga pada pengembangan soft skills yang penting untuk keberhasilan di dunia kerja. Soft skills seperti kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, dan pengelolaan waktu sangat dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan agar mereka dapat bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Program-program pelatihan yang menggabungkan keterampilan teknis dan soft skills akan menciptakan SDM yang lebih siap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial di masa depan (Wahyu, 2020).

Diversifikasi sektor ekonomi di wilayah pedesaan menjadi salah satu strategi yang penting dalam memperkuat perekonomian lokal dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Di Provinsi Lampung, sektor ekonomi selain pertanian seperti agrowisata, industri kecil dan menengah (IKM), serta kerajinan tangan mulai menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas, desa-desa di Lampung tidak hanya dapat meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga mengurangi ketergantungan yang berlebihan pada sektor pertanian semata. Agrowisata, misalnya, menjadi pilihan menarik yang memanfaatkan keindahan alam Lampung untuk menarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Program-program berbasis komoditas unggulan, seperti kopi, cokelat, dan kerajinan tangan, telah memberikan dampak positif bagi perekonomian desa, membuka lapangan kerja baru, dan memperkenalkan produk lokal ke pasar yang lebih luas (Wibowo, 2019).

Namun, meskipun diversifikasi sektor memberikan banyak manfaat, tantangan yang besar juga muncul dalam upaya memperkuat ekonomi lokal. Salah satunya adalah keterbatasan akses pasar bagi produk-produk unggulan desa yang memiliki potensi besar. Meskipun produk-produk tersebut memiliki kualitas tinggi, namun banyak desa yang mengalami kesulitan untuk menjangkau pasar yang lebih luas karena kurangnya jaringan distribusi dan pemasaran yang efektif. Oleh karena itu, perlu ada perhatian serius dari pemerintah dalam memperbaiki sistem distribusi produk dari desa ke pasar-pasar besar, baik domestik maupun internasional. Penggunaan platform digital dan pemasaran online juga dapat menjadi solusi untuk memperkenalkan produk desa kepada konsumen yang lebih luas dan menghubungkan mereka dengan pasar global (Sutrisno, 2020).

Selain masalah distribusi, penguatan ekonomi lokal juga membutuhkan dukungan finansial yang memadai untuk memfasilitasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi baru ini. Bantuan modal usaha menjadi salah satu kebutuhan mendesak bagi para pelaku usaha di desa, yang sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Program-program pemberdayaan ekonomi, seperti kredit mikro atau bantuan dana hibah, harus tersedia untuk mendukung usaha kecil dan menengah di pedesaan. Pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta sektor swasta perlu bekerja sama untuk menyediakan pembiayaan yang mudah diakses dan disesuaikan dengan kebutuhan usaha kecil di desa-desa Lampung (Tama, 2018).

Peningkatan kapasitas pelaku usaha di pedesaan juga menjadi aspek yang tidak kalah penting dalam pengembangan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Banyak pelaku usaha di desa yang masih terbatas pengetahuan dan keterampilannya dalam mengelola usaha secara profesional dan efisien. Oleh karena itu, pelatihan dan pembekalan mengenai manajemen usaha, pemasaran, serta inovasi produk sangat diperlukan untuk memastikan bahwa produk-produk unggulan desa dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Pemerintah dan

lembaga pendidikan dapat bekerja sama untuk menyediakan program pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan sesuai dengan perkembangan sektor ekonomi lokal (Budi, 2019).

Selain itu, peran teknologi dalam memajukan ekonomi lokal tidak bisa dipandang sebelah mata. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam dunia usaha dapat meningkatkan efisiensi dan mempercepat distribusi produk dari desa ke pasar. Melalui pemanfaatan teknologi digital, para pelaku usaha di desa dapat memasarkan produk mereka secara online, menjangkau konsumen di luar daerah, bahkan internasional. Pengembangan platform digital untuk mempromosikan produk desa seperti melalui media sosial, marketplace, atau website e-commerce dapat membuka peluang pasar yang lebih luas dan meningkatkan daya saing produk lokal (Mardiana, 2020).

Penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor juga memerlukan kebijakan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap kegiatan ekonomi harus menjadi prioritas. Misalnya, dalam sektor agrowisata dan industri kecil, penerapan prinsip ramah lingkungan harus diterapkan agar kegiatan ekonomi tidak merusak ekosistem lokal. Selain itu, keberlanjutan produk dan bahan baku yang digunakan dalam usaha juga perlu diperhatikan agar tidak menghabiskan sumber daya alam secara berlebihan. Pembangunan yang berkelanjutan akan memastikan bahwa manfaat ekonomi dapat dinikmati dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan (Rahmawati, 2018).

Peran pemerintah daerah dalam mendukung penguatan ekonomi lokal juga sangat penting. Pemerintah harus aktif dalam merancang kebijakan yang mendukung diversifikasi sektor ekonomi dengan menyediakan infrastruktur yang memadai dan insentif bagi para pelaku usaha. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan adanya regulasi yang mendukung pelaku usaha desa dalam mengakses pasar, baik domestik maupun internasional. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus dioptimalkan untuk mewujudkan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung (Sulastrri, 2017).

Keberhasilan diversifikasi sektor ekonomi di desa Lampung tidak hanya akan memberikan dampak positif pada pendapatan masyarakat, tetapi juga pada keberlanjutan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan mendiversifikasi sektor ekonomi, desa-desa di Lampung dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mandiri dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, berbagai upaya untuk memperbaiki distribusi pasar, meningkatkan kapasitas pelaku usaha, serta memanfaatkan teknologi harus terus diperkuat agar ekonomi lokal dapat berkembang dengan maksimal dan berkelanjutan (Putri, 2020).

Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta memainkan peran penting dalam mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan, terutama di daerah pedesaan seperti di Lampung. Kolaborasi antara kedua pihak ini telah terwujud dalam berbagai bentuk kerja sama yang produktif, mulai dari pembiayaan proyek-proyek infrastruktur hingga penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Misalnya, pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya dapat dipercepat dengan adanya kontribusi finansial dan teknis dari sektor swasta. Selain itu, pengembangan sektor-sektor unggulan, seperti pertanian organik dan pariwisata, juga mendapat dorongan besar dari sektor swasta yang membawa inovasi serta pengelolaan yang lebih efisien. Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator yang menjembatani hubungan antara masyarakat pedesaan dengan sektor swasta, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Sutrisno, 2020).



Poin-Poin Sinergi yang Telah Dicapai:

- Pembiayaan proyek infrastruktur: Sektor swasta berperan dalam memberikan investasi untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan, yang menghubungkan wilayah perkotaan dan pedesaan.
- Penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan: Kolaborasi dengan sektor swasta juga mencakup penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih memadai di desa-desa, melalui pembangunan sekolah dan klinik kesehatan.
- Pengembangan sektor unggulan: Pemerintah dan sektor swasta bekerja sama dalam pengembangan sektor pertanian organik dan pariwisata, yang dapat meningkatkan perekonomian lokal secara signifikan.
- Pengelolaan sumber daya alam: Sektor swasta berkontribusi dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, seperti dalam sektor energi terbarukan dan pengelolaan sampah, yang mendukung kelestarian lingkungan (Wibowo, 2019).

Namun, meskipun kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta menunjukkan hasil yang positif, masih ada sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah perbedaan tujuan antara pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan sosial dan sektor swasta yang lebih fokus pada keuntungan finansial. Ketidakcocokan ini bisa menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat dari proyek pembangunan. Sebagai contoh, proyek-proyek yang dibiayai sektor swasta sering kali lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek, sementara kebutuhan masyarakat pedesaan yang lebih mendalam dan berkelanjutan bisa terabaikan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih jelas mengenai tujuan dan manfaat bersama dari setiap proyek yang dilakukan, dengan fokus pada kesejahteraan masyarakat desa (Tama, 2018). Selain itu, kurangnya koordinasi lintas sektor dan perbedaan kepentingan antar lembaga juga menjadi tantangan tambahan yang dapat memperlambat pelaksanaan program sinergi. Keterbatasan kapasitas institusional di tingkat lokal memperburuk kesenjangan dalam pengawasan dan evaluasi proyek, sehingga hasil pembangunan sering tidak optimal atau tidak berkelanjutan.

Tantangan yang Dihadapi dalam Sinergi Pemerintah dan Sektor Swasta:

- Ketidakcocokan tujuan antara pemerintah dan sektor swasta yang berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam hasil pembangunan.
- Fokus yang lebih besar pada keuntungan jangka pendek bagi sektor swasta, dibandingkan dengan kebutuhan sosial dan lingkungan yang berkelanjutan di daerah pedesaan.
- Kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam kerja sama yang bisa menimbulkan keraguan bagi masyarakat desa terkait manfaat nyata dari proyek-proyek tersebut.

Untuk memastikan bahwa kerja sama ini dapat terus berkembang dengan baik, penting untuk menciptakan mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel dalam hubungan antara pemerintah dan sektor swasta. Salah satu langkah penting adalah dengan mengadakan forum-dialog yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat pedesaan. Forum ini akan menjadi wadah untuk mendiskusikan kepentingan bersama, mengidentifikasi potensi masalah, dan menemukan solusi yang saling menguntungkan. Selain itu, perlu adanya regulasi yang memadai untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan tidak hanya menguntungkan sektor swasta, tetapi juga memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan di Lampung (Putri, 2020).



Langkah-Langkah untuk Memperkuat Sinergi:

- Pembentukan forum dialog antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan pembangunan.
- Penerapan regulasi yang menekankan keberlanjutan sosial dan lingkungan dalam proyek pembangunan yang melibatkan sektor swasta.
- Pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi proyek agar tidak hanya menguntungkan pihak tertentu, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat desa.

Keberlanjutan dan keberhasilan sinergi ini akan sangat bergantung pada komitmen dan keterlibatan semua pihak. Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat harus bersama-sama menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan. Jika sinergi ini dikelola dengan baik, maka akan memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Lampung, serta dapat menjadi model bagi daerah lain di Indonesia dalam mendorong keseimbangan antara pembangunan perkotaan dan pedesaan (Rahmawati, 2018).

Kesimpulan

Pembangunan yang seimbang antara kawasan perkotaan dan pedesaan di Provinsi Lampung sangat penting untuk menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur menjadi kunci utama dalam meningkatkan aksesibilitas dan memfasilitasi distribusi barang dan jasa antar wilayah. Infrastruktur yang terhubung dengan baik dapat membuka peluang ekonomi, mempercepat pertumbuhan sektor-sektor lain, dan mengurangi ketimpangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di kedua wilayah tersebut.

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) di wilayah pedesaan juga menjadi faktor penting dalam mencapai keseimbangan pembangunan. Program-program pelatihan keterampilan, pendidikan vokasi, serta pengembangan kewirausahaan berbasis potensi lokal di desa-desa dapat meningkatkan kapasitas SDM yang ada. Hal ini akan memperkuat daya saing masyarakat pedesaan, memfasilitasi adopsi teknologi baru, dan mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian semata. Keberhasilan pengembangan SDM ini memerlukan dukungan kuat dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam menyediakan akses pendidikan dan pelatihan yang relevan. Selain itu, secara kebijakan, penelitian ini mendorong penguatan kerangka regulasi yang mendukung distribusi investasi ke sektor infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi kreatif di pedesaan.

Diversifikasi sektor ekonomi juga menjadi strategi yang penting dalam memperkuat perekonomian lokal di pedesaan. Di Lampung, pengembangan sektor-sektor ekonomi selain pertanian, seperti agrowisata, industri kecil dan menengah (IKM), dan kerajinan tangan, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Dukungan terhadap produk unggulan lokal, baik dalam bentuk promosi maupun fasilitasi akses pasar, menjadi langkah strategis untuk menciptakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini membutuhkan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta, untuk memastikan keberlanjutan dan daya saing produk-produk lokal di pasar global.



Sinergi antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan wilayah pedesaan di Lampung sangat penting untuk mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Kemitraan ini dapat diwujudkan melalui pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan di daerah pedesaan. Namun, tantangan utama yang perlu diatasi adalah keselarasan antara tujuan ekonomi perusahaan swasta dan kebutuhan sosial masyarakat desa. Oleh karena itu, penting untuk membangun mekanisme kerja sama yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial dan lingkungan. Sinergi ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan yang merata dan berkelanjutan di Provinsi Lampung. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup wilayah studi yang hanya terfokus di Provinsi Lampung sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke wilayah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah serta menggunakan metode kuantitatif atau campuran guna memperoleh hasil yang lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Aminah, S. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sumber Daya Alam. *Jurnal Pengembangan Wilayah*, 5(2), 42-50.
- Ansar, Z., & de Vries, W. T. (2024). Urban Sprawl Symptoms in Bandar Lampung Suburban Area, Indonesia. *Geoplanning: Journal of Geomatics and Planning*, 11(2), 205–222. <https://doi.org/10.14710/geoplanning.11.2.205-222>
- Ardiansyah, R., & Fatimah, N. (2021). Implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Tinjauan Kebijakan dan Tantangan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(2), 234-248.
- Arisanty, D., Ariyani, F., & Fauzi, A. (2023). Developing Rural Tourism in Lampung: Integrating Potential, Local Creativity, and Sustainability. *Proceedings of the International Conference on Economics, Business, Finance, and Governance*. Retrieved from <https://proceedingconference.uhl.ac.id/index.php/icebfg/article/download/100/89/330>
- Budi, P. (2019). Peningkatan Kapasitas Usaha Kecil di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Pembangunan Ekonomi*, 3(2), 34-45.
- Darmawan, A., & Siregar, F. (2021). Sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Pembangunan Wilayah. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 8(1), 45-60.
- Fitria, R. (2017). Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(1), 23-35.
- Hartono, D., & Sulastri, E. (2021). Pembangunan Pedesaan dan Ketimpangan Akses Infrastruktur di Kawasan Tertinggal. *Jurnal Perencanaan Pembangunan*, 5(1), 45-60.
- Kurniawan, T., & Astuti, S. (2019). Tantangan Pemerintah Daerah dalam Era Desentralisasi Pembangunan. *Jurnal Otonomi Daerah*, 11(2), 78–91.
- Mahmud, I., & Junaidi, J. (2024). Design of Community Organizing Development in Rural Areas: Study of Community Organizing Model in Lampung Province, Indonesia. *Proceedings of the 4th International Indonesia Conference on Interdisciplinary Studies*. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/378512653>
- Mardiana, A. (2020). Pemanfaatan Teknologi untuk Pengembangan Ekonomi Lokal. *Jurnal Teknologi dan Masyarakat*, 5(1), 72-85.
- Mardiasmo, D. (2018). *Manajemen Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Andi Publisher.



- Puspita, N. P. R., Rustiadi, E., & Kolopaking, L. M. (2025). Evaluation and Development Strategy of The Minapolitan Area in Pasir Sakti Sub-District, Lampung Timur Regency. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 9(1), 59–71. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2025.9.1.59-71>
- Prasetyo, D., & Dewi, F. (2022). Ketimpangan Infrastruktur dan Akses Publik di Provinsi Lampung. *Jurnal Pembangunan Wilayah*, 6(3), 112–126.
- Rahmawati, L. (2018). Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengembangan Ekonomi Desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 4(2), 22-36.
- Rahayu, L. (2016). Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Pedesaan. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 10(2), 56-67.
- Sari, R., & Nugroho, H. (2021). Kebijakan Pembangunan Kota Berkelanjutan: Studi di Kota Batu. *Jurnal Tata Ruang dan Lingkungan*, 10(1), 56-70.
- Sutrisno, D. (2020). Kerja Sama Sektor Swasta dan Pemerintah dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan Publik*, 7(1), 12-25.
- Sulastri, H. (2017). Peran Pemerintah dalam Mendorong Diversifikasi Ekonomi Desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 11-25.
- Sudarsono, P. (2017). Pengembangan Keterampilan dan Pendidikan Vokasi di Daerah Perdesaan. *Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, 4(2), 30-45.
- Sutrisno, D. (2020). Penguatan Ekonomi Lokal Melalui Diversifikasi Sektor di Pedesaan. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 7(3), 45-59.
- Tama, J. (2018). Strategi Penguatan Ekonomi Lokal melalui Sektor Non-Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pedesaan*, 6(2), 33-47.
- Wahyu, S. (2020). Peningkatan Soft Skills dalam Pengembangan SDM Pedesaan. *Jurnal Manajemen Sumber Daya*, 8(1), 15-29.
- Wibowo, R. (2019). Diversifikasi Ekonomi dan Penguatan Perekonomian Desa di Lampung. *Jurnal Agribisnis dan Ekonomi*, 3(1), 50-63.
- Yuliana, A., & Herlambang, R. (2021). Strategi Pembangunan Wilayah Terpadu di Provinsi Lampung. *Jurnal Perencanaan dan Kebijakan Daerah*, 9(2), 99–115.
- Yuliana, D. (2020). Pelatihan Kewirausahaan di Wilayah Perdesaan. *Jurnal Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(3), 17-26.